

PENGARUH AKSESIBILITAS DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Sukhemi

Universitas PGRI Yogyakarta,
Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta

Abstract

The research aims at analyzing the impact of accessibility and the range of explanation in finance report towards the accountability of district finance. This research used double linear regression model.

In collecting data, this empirical research used quota sampling technique. The data are collected by using 200 questionnaires that spread to many stakeholders of district finance report such as legislators, public servant, lecture, and labors. Data was analyzed by using double linear regression with program SPSS version 16.

The research result shown that accessibility positively influence toward accountability in district finance. The range of explanation in finance report have not influence significantly toward accountability in district finance.

Keywords: *Accesibility, The range of explanation finance report, Accountability.*

Latar Belakang

Sumarlin (2004) dalam Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggara negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Hal inilah juga yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Budiardjo (2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden,

wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

Mulyono (2006) menguji secara empiris apakah penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penyajian neraca daerah maupun aksesibilitas laporan keuangan keduanya berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Mulgan (2000), meneliti dan membandingkan bagaimana fungsi akuntabilitas dalam sektor publik dan swasta/privat. Ternyata sektor publik di Australia lebih mempunyai akuntabilitas yang kuat dibandingkan sektor swasta /privat. Hal ini disebabkan sektor publik lebih mempunyai pengendalian dan akuntabilitas melalui pemerintah dan parlemen sedangkan sektor swasta/privat hanya melakukan pertanggungjawaban kepada komisaris perusahaan. Padahal

sektor publik dalam hal ini pemerintah kadang melakukan kontrak-kontrak pekerjaan dengan pihak swasta/privat. Tindakan kontrak ini kemudian memicu keinginan masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam sektor swasta/privat.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan menyebutkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan (Sukhemi, 2011).

Mulgan (1997) dalam Sukhemi (2010) meneliti mengenai proses untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Proses akuntabilitas publik ternyata mengalami perjalanan yang sangat panjang. Hal ini dibuktikan dengan saluran untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang dimulai dari pelayan masyarakat kemudian menuju ke arah menteri, parlemen, pengadilan dan ombudsman baru menuju ke arah masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2006). Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada stakeholder adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apakah ada

pengaruh aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap stakeholder laporan keuangan daerah ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah?
2. Apakah tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperkuat bukti empiris mengenai pengaruh aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Kontribusi praktik berupa masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

Kajian Teori

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2004) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (2)

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mahsun dkk. (2007) adalah sebagai berikut:

1. Laporan relisasi anggaran, yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.
2. Neraca, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu.
3. Laporan arus kas, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
4. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
5. Laporan kinerja keuangan, merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis aktual.
6. Laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kearns (1994) meneliti mengenai berbagai jenis akuntabilitas yang ada dalam sektor publik dan membaginya ke dalam 4 jenis. (1) Akuntabilitas kepatuhan, yaitu akuntabilitas yang lebih menekankan pada kepatuhan organisasi publik dalam melakukan praktik pelayanan. (2) Akuntabilitas negosiasi, yaitu akuntabilitas yang lebih menekankan pada tawar-menawar karena adanya keinginan publik (*public Interest*) yang sangat beraneka ragam, selain itu faktor politik dan keuangan juga turut menentukan akuntabilitas ini.

(3) Akuntabilitas *entrepreneurial* atau diskresionari, yaitu akuntabilitas yang lebih menekankan pada kemampuan manajer publik untuk mempunyai pendekatan wira-swasta karena adanya tekanan dari pembayar pajak agar pemerintah meningkatkan pelayanan kepada publik. (4) Akuntabilitas antisipasi, yaitu akuntabilitas yang menekankan pada kemampuan manajer publik untuk mengantisipasi hal penting apa yang kemungkinan akan terjadi dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik dengan menggunakan kemampuan antisipasi tersebut.

Dari perspektif sistem akuntabilitas, membagi karakteristik pokok sistem akuntabilitas kedalam lima bagian :

1. Berfokus pada hasil (*outcomes*).
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja.
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan.
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu.
5. Melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya secara teratur.

Aksesibilitas

Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar bahasa indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Mulyono (2006) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Kadarmi (2008) menunjukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Menurut Jones et al (1995) dalam Mulyono (2006), ketidak mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan

tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Wolk et al (2004) dalam Sukhemi (2011) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan keseluruhan informasi yang ada dalam laporan keuangan (*financial statement*) dan komunikasi tambahan yang terdiri dari catatan kaki, kejadian setelah tanggal neraca, analisis manajemen dan informasi tambahan di luar biaya historis.

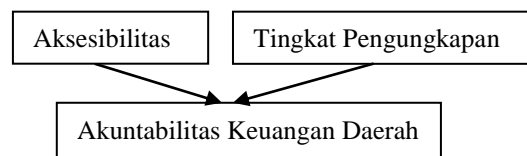
PSAP nomor 4 tahun 2005 menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis aktual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Perumusan Hipotesis dan Model Penelitian

Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat memberikan aksesibilitas laporan keuangan dan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam memenuhi hak publik. Berdasarkan hal tersebut, maka model dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:



Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis:

1. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan 3 variabel, yaitu:

1. Aksesibilitas (X)
2. Tingkat Pengungkapan (X)
3. Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah stakeholder laporan keuangan pemerintah

antara lain anggota DPRD, guru/dosen, pembayar pajak/masyarakat umum dan LSM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara non probabilitas yaitu *quota sampling*. Dalam *quota sampling*, peneliti menentukan target kuota yang dikehendaki. Target kuota mengacu pada pendapat yang menyatakan bahwa *sample size larger than 30 and less than 500 are appropriate for most research. In multivariate research (including multiple regression analysis), the sample size should be several times (preferable 10 times or more) as large as the number of variable in the study* (Sekaran, 2003).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data asli. Dan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, artinya dengan membagikan daftar pertanyaan yang berhubungan variabel yang diteliti yaitu aksesibilitas laporan keuangan, tingkat pengungkapan laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan daerah.

Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Data yang dapat dilakukan analisis faktor bila nilai MSA di atas 0,5 (Kaiser & Rice, 1974) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki *factor loading* di atas 0,40 (Chia, 1995).

Hasil pengujian validitas didapatkan untuk semua instrumen didapatkan nilai MSA > 0,5, sehingga dalam pengujian validitas tidak ada data penelitian yang direduksi. Selain itu hasil pengujian juga didapatkan semua item mempunyai nilai *factor loading* yang lebih dari 0,4. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mengukur konstruksi aksesibilitas laporan keuangan,

tingkat pengungkapan laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan daerah adalah valid.

Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Cronbach's Alpha. Kriteria dalam pengujian reliabilitas berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*, menurut Sekaran (2003 : 311), secara umum apabila didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,60 berarti buruk, sekitar 0,70 diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik. Hasil pengujian reliabilitas didapatkan semua nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7 untuk semua instrumen yang digunakan dalam pengambilan data penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka berarti instrumen yang digunakan dalam penelitian reliabel atau mempunyai tingkat konsistensi yang tinggi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang memudahkan untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan diukur dengan skala Likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel ini diukur dengan menggunakan lima pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Mul-yono (2006).
2. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan adalah informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan daerah. Tingkat pengungkapan diukur dengan skala Likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel ini diukur dengan menggunakan enam pertanyaan yang diadopsi dari PSAP nomor 4 tahun 2005.
3. Akuntabilitas Laporan Keuangan adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2004). diukur dengan skala Likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel ini diukur dengan menggunakan lima pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Wisnu (2007).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas laporan keuangan.
 b_0 = Konstanta.
 X_1 = Aksesibilitas laporan keuangan.
 X_2 = Tingkat pengungkapan.
 b_1, b_2 = Koefisien regresi.
 e = Error term.

Uji t

Tujuan dari uji t adalah untuk mengetahui apakah secara individual variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: Algifari (2000);

$$t = \frac{b}{S_b}$$

Keterangan:

- b = Koefisien regresi.
 S_b = Kesalahan standar koefisien regresi.

Kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_0 ditolak jika $p \leq 0,05$

H_0 diterima jika $p > 0,05$

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, dan dilakukan dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian didapatkan nilai t sebesar 3,362 dan nilai p sebesar 0,001. Berdasarkan nilai t yang positif dan nilai $p < 0,05$, maka disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis 1 dalam penelitian ini terbukti.

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut dalam mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan daerah.

Pengujian hipotesis 2 dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, dan dilakukan dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian didapatkan nilai t sebesar -1,517 dan nilai p sebesar 0,132. Berdasarkan nilai $p > 0,05$, maka disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini tidak terbukti.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan daerah mempunyai persepsi bahwa tingkat akuntabilitas suatu laporan keuangan tidak tergantung dari tingkat pengungkapan yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,

ekonomi makro, pencapaian target termasuk kendalanya, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan lain. Informasi yang bersifat tambahan tersebut diakses pengguna secara bertahap dari perjalanan program-program yang dikeluarkan daerah, melalui berbagai sumber dan media. Tingkat pengungkapan informasi-informasi tambahan dari pemerintah daerah, yang dipandang tidak sesuai dengan persepsi pengguna mengenai informasi tersebut, justru dapat menjadi sebuah point yang mengurangi tingkat akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut dalam mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini memperkuat pendapat Jones et al (1995) dalam Mulyono (2006), yang menyatakan bahwa ketidak mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.
2. Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan daerah mempunyai persepsi bahwa tingkat akuntabilitas suatu laporan keuangan tidak tergantung dari tingkat pengungkapan yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,

pencapaian target termasuk kendalanya, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan lain.

Keterbatasan dan Saran

Evaluasi atas penelitian ini harus mempertimbangkan beberapa keterbatasan dan saran yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini:

1. Penelitian hanya menggunakan *stakeholder* laporan keuangan daerah di Yogyakarta, sehingga penelitian ini sulit untuk digeneralisasikan untuk semua *stakeholder* laporan keuangan di Indonesia.
2. Responden divariasikan untuk semua *stakeholder* laporan keuangan di Indonesia, agar dapat melihat hasil yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Algifari. 2000. *Analisis Regresi Teori Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Budiardjo, M. 2000. *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Chia. Y. M.(1995). *Decentralization, Management Accounting Systems (MAS) Information Characteristic and Their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore Study*, Journal of Business Finance and Accounting, Sept: 811-830.
- Kadarmi, T. (2008). *Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*, Skripsi S1. tidak dipublikasikan. Yogyakarta: FEB UGM.
- Kaiser. H. F., dan J. Rice. (1974). Little Jiffy, Mark IV, *Educational and*

- Psychological Measurement*. Vol.34, No.1, (Spring) : 111-117.
- Kearns, P. Kevin. 1994. *Accountability and Entrepreneurial Public Management: The Case of the Orange County Investment Fund*. California.
- Mahsun, M. Sulistiyowati, F. dan Andre Pur-wanugraha, H. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No.1, Mei: 1-17.
- Mulgan, Richard. 2000. *Comparing Accountability in the Public and Private Sectors*, *Journal of Public Administration*.
- Mulyono Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Tesis S2. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Magister Akuntansi UGM.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sekaran, U. 2003. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Sukhemi 2010. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*, Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 5, April: 85-100.
- Sukhemi. 2011. *Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah*, Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 8, Oktober: 84-95.
- Wisnu H Sri. 2007. *Persepsi Stakeholder Terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Tesis S2, Tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Magister Akuntansi UGM.